



# HISTORIA VITAE

Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah

Volume 23, No.1, April 2009

ISSN - 0215-8809

- **ENVIRONMENTAL EDUCATION: KRATONS OF KERTO, PLERED, AND KOTA GEDE**  
Billy Gunterman
- **BERSAHAJA SEKALIGUS PERKASA: PEREMPUAN DESA DALAM INDUSTRI RAKYAT, YOGYAKARTA 1830-AN - 1930-AN**  
Anton Haryono
- **ERA BARU (DARI MINTO - PEMILIHAN) (1909-1947)**  
B. Musidi
- **PERKEMBANGAN EKONOMI JEPANG PADA ERA SHOGUNAT TOKUGAWA**  
Y.R. Subakti
- **PROFI: KRONOLOGI**

Diterbitkan oleh :  
Program Studi Pendidikan Sejarah - FKIP, Jurusan Ilmu Sejarah - Fakultas Sastra  
Universitas Sanata Dharma  
Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002  
E-mail: [spps@staff.usd.ac.id](mailto:spps@staff.usd.ac.id)



# **HISTORIA VITAE**

## **SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH**

---

HISTORIA VITAE adalah majalah ilmiah yang berisi kumpulan hasil penelitian dan/ atau karangan ilmiah mengenai kependidikan dan/atau kesejarahan dari para dosen dan alumni Program Studi Pendidikan Sejarah - FKIP dan Jurusan Ilmu Sejarah- Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Majalah ini terbit dua kali setahun: April dan Oktober.

Redaksi menerima naskah, baik yang berbahasa Indonesia, maupun berbahasa Inggris. Naskah harus ditulis sesuai dengan format yang berlaku di HISTORIA VITAE, dan harus diterima oleh redaksi paling lambat dua bulan sebelum terbit. Isi karangan yang dimuat tidak selalu mencerminkan pendapat Redaksi, maka tanggung jawab isi sepenuhnya di tangan penulis.

---

### **DEWAN REDAKSI**

Pemimpin Umum/Penanggung jawab/

: Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.

Pemimpin Redaksi

Anggota Dewan Redaksi

: Drs. B. Musidi, M.Pd.

Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th.

Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.

---

### **REDAKTUR AHLI**

Dr. F.X. Baskara T. Wardaya SJ, M.A. .... Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Dr. Anton Haryono, M.Hum. .... Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

---

### **REDAKTUR PELAKSANA**

Drs. Y.R. Subakti, M.Pd.

Dra. Theresia Sumini, M.Pd.

Drs. A.A. Padi

---

### **SEKRETARIAT ADMINISTRASI**

R. Marsidiq

---

### **ALAMAT REDAKSI**

Program Studi Pendidikan Sejarah-FKIP, Universitas Sanata Dharma

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

Telepon (0274) 513301, 515352; Fax. (0274) 562383

Telegram: SADHAR YOGYA

E-mail: [spps@staff.usd.ac.id](mailto:spps@staff.usd.ac.id)

# HISTORIA VITAE

SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH

---

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Editorial .....	iii
<i>Environmental Education: Kratons of Kerto, Plered, and Kota Gede.....</i> Billy Gunterman	1 - 10
<i>Bersahaja Sekaligus Perkasa: Perempuan Desa dalam Industri Rakyat, Yogyakarta 1830-an - 1930-an .....</i> Anton Haryono	11 - 29
<i>Era Baru (Dari Minto - Pemilahan) (1909-1947) .....</i> B. Musidi	30 - 45
<i>Perkembangan Ekonomi Jepang pada Era Shogunat Tokugawa .....</i> Y.R. Subakti	46 - 64
<i>Profil: Kronologi .....</i>	65 - 96



## BERSAHAJA SEKALIGUS PERKASA: PEREMPUAN DESA DALAM INDUSTRI RAKYAT, YOGYAKARTA 1830-AN - 1930-AN

Anton Haryono

### Pengantar

Pandangan Jawa tradisional sering menganggap perempuan sebagai *kanca wingking*, teman belakang atau pelengkap laki-laki, yang kerjanya terbatas pada urusan dapur. Seakan-akan perempuan tidak memiliki peran lain kecuali memasak atau mengatur kebutuhan rumah tangga dari rejeki yang diperoleh suaminya. Bila pandangan ini digabungkan dengan pandangan kolonial yang menyatakan bahwa orang Jawa terlalu santai dalam hidup, bahkan cenderung malas bekerja, maka celakalah kaum perempuan, karena penilaian terhadapnya akan menjadi berbunyi: "*kanca wingking* dari masyarakat yang tidak memiliki vitalitas".

Dalam banyak kasus, dua pandangan di atas bukanlah gambaran dari realitas sosial. Beroperasinya pandangan-pandangan subyektif itu cenderung merupakan alat penundukan atau marginalisasi. Fakta-fakta kongkret mengenai peran dan kerja keras perempuan dalam kehidupan diabaikan atau disangkal oleh kedua pandangan yang sesungguhnya sarat dengan kepentingan "politis". Kaum perempuan yang juga memiliki peran penting di masa lalu pun kemudian nyaris tidak disejarahkan, karena selama ini kisah sejarah didominasi oleh peran kaum laki-laki. Menurut Bambang Purwanto dalam kritiknya yang bernas (2006: 30), "*ibu pertiwi*", yang sering dipakai oleh orang Indonesia untuk menyebut tanah airnya, ternyata secara historiografis (masih) berkelamin laki-laki. Dari contoh-contoh yang diajukan Profesor Bambang (2006: 31-37), terlihat banyak peran penting perempuan di masa lalu hilang dari narasi sejarah.

Makalah ini secara khusus berusaha melihat peran perempuan desa dalam industri rakyat di daerah Yogyakarta pada masa kolonial. Para perempuan desa adalah orang-orang bersahaja tetapi sekaligus perkasa, bahkan tidak hanya tampak pada zaman kolonial, tetapi juga pada masa sekarang. Mereka adalah pekerja-pekerja keras yang memiliki kontribusi signifikan dalam menyelamatkan kehidupan ekonomi keluarga ataupun dalam menciptakan ikon-ikon (prestasi khusus) aktivitas ekonomi non-

---

*Dr. Anton Haryono, adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra - Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.*



pertanian tertentu bagi daerah Yogyakarta. Peran penting mereka di masa lalu berhak untuk memperoleh narasi dalam historiografi masa kini.

Sebelum kita menyimak kembali aktivitas ekonomi perempuan desa di daerah Yogyakarta pada 1830-an-1930-an, kita pantas bertanya secara reflektif terlebih dahulu: siapakah yang berada di balik ketenaran lintas batas gula kelapa Kokap, slondok Kalibawang, geplak Bantul, yangko Kotagede, bakpia Pathuk, tenun Gamplong, batik Yogyakarta, gerabah Kasongan, anyam-anyaman Dlingo, caping Ngawen pada saat ini? Tanpa bermaksud mengabaikan keterlibatan laki-laki, peran penting perempuan jelas tak terbantahkan. Apalagi, contoh di atas hanyalah sebagian saja dari sederet sentra industri kecil yang melibatkan secara aktif partisipasi perempuan. Selain itu, tingkat kepenekunan industri rakyat pada masa kolonial jauh lebih luas dibandingkan dengan masa sekarang.

Pada tahun 2008 saya selama beberapa bulan berkeliling ke berbagai pelosok desa di DIY untuk melakukan survey lapangan dan wawancara intensif di sentra-sentra industri kecil. Setiap pekan berton-ton gula kelapa dihasilkan oleh masyarakat pegunungan di Kokap dan Kalibawang (Kulonprogo). Ribuan caping setiap 2 - 3 hari dihasilkan oleh keluarga-keluarga petani di Ngawen (Gunung Kidul). Berbagai barang anyaman dari bambu lainnya juga masih diproduksi dengan amat giat di banyak tempat, seperti di Minggir (Sleman), Dlingo (Bantul), Gedangsari dan Karangmojo (Gunungkidul), dan Kalibawang (Kulonprogo). Begitu pula, aneka produk gerabah terus mengalir dari Kasihan dan Pundong (Bantul) serta Lendah (Kulonprogo). Seperti halnya tenun, batik, dan produk-produk makanan khas, berbagai produk di atas memiliki pasar yang luas, tidak terbatas di DIY saja. Barang-barang anyaman bambu yang sangat sederhana sekalipun mampu menembus kota-kota besar, seperti Jakarta dan Denpasar.

Semua nara sumber menceritakan bahwa kerajinan yang ditekuni di desanya sudah berlangsung sejak dahulu kala, sejak *mbah-mbuh* istilah mereka. Kendati secara kualitatif terjadi perubahan pada produk-produk tertentu, secara kuantitatif apa yang terlaksana pada masa kini hanyalah sisa-sisa masa lalu. Mengingat sisa-sisa masa lalu itu masih cukup luas cakupannya, maka bisa dibayangkan betapa luasnya aktivitas industri rakyat di masa lalu sendiri. Padahal, contoh-contoh di atas baru mengenai cabang-cabang industri yang banyak melibatkan partisipasi perempuan. Apabila cabang-cabang industri yang berkarakter laki-laki disertakan, maka daftarnya akan menjadi lebih panjang, karena kita setidaknya akan menemukan industri perak, tembaga, kuningan, besi, kaleng, tanduk, dan



kulit dalam aneka bentuknya. Cabang-cabang industri ini juga masih menunjukkan vitalitas yang tinggi. Bahkan, sentra pande besi di Wonosari (Gunungkidul) pada saat ini melibatkan lebih dari 400 orang tenaga kerja, yang setiap hari mendaur ulang lebih dari 3,5 ton besi bekas dan konon merupakan sentra pandai besi terbesar di Jawa dengan jangkauan pasar hingga pulau-pulau di luar Jawa.

Kegiatan industri di tengah-tengah masyarakat agraris yang tergelar di DIY pada saat ini sangat menarik untuk diteliti dari berbagai sisi. Namun, makalah ini tidak akan membicarakannya, kecuali sebagai titik pijak yang serba terbatas. Makalah akan berfokus pada kelampauan dari aktivitas non-pertanian itu, yakni pada masa penjajahan, masa ketika pandangan kolonial sedemikian merendahkan vitalitas orang Jawa dalam perikehidupan sosial-ekonomi. Selain itu, makalah hanya akan membahas peran perempuan, sehingga narasi yang dihasilkan bukanlah gambaran lengkap tentang masa lalu industri rakyat di DIY. Pemilihan perempuan sebagai tema lebih merupakan bentuk akomodasi terhadap minimnya narasi tentang peran mereka dalam historiografi Indonesia, dan sama sekali bukan untuk mengingkari peran laki-laki.

### **Bermula dari Usaha Mencukupi Kebutuhan Sendiri**

Pembuatan aneka barang kebutuhan rumah tangga, bahkan juga barang-barang kemewahan, telah lama berlangsung di daerah Yogyakarta. Kegiatan ini awal mulanya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri (setempat) yang berpijak pada prinsip swa-sembada. Dalam hal ini, keraton di masa lalu memberikan contoh pelaksanaan prinsip swa-sembada yang baik. Keraton bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi di dalam dirinya senantiasa terdapat kelompok-kelompok tukang dan perajin terampil yang dipelihara untuk menghasilkan berbagai macam barang. Meskipun orientasinya bukan untuk melayani pasar, spesialisasi pekerjaan telah lama terjadi di lingkungan istana-raja. Inilah yang lazim disebut spesialisasi pra-pasar, spesialisasi yang diarahkan oleh dan mengabdikan kepada penguasa (John Hicks, 1969: 22-24). Dari sini, para tukang dan perajin keraton tidak hanya penting bagi tersedianya barang-barang kebutuhan praktis, tetapi juga aneka barang mewah yang mampu mendukung kultus kemegahan raja. Perlu diingat, harta benda adalah salah satu sarana material bagi kultus tersebut (Moertono, 1985: 84).

Tukang dan perajin keraton bukanlah semata-mata orde laki-laki. Memang, apabila ditinjau dari eksistensi bangunan istana, meubel, kereta, gamelan, wayang, keris, tombak, perisai, dan aneka perhiasan dari emas



dan perak, peran laki-laki akan mengemuka. Namun, pada aspek lain, peran perempuan bagi keagungan istana tidak kalah berharga. Jumlah mereka pun sering cukup besar. Setidaknya, pada 1656 van Goens pernah menceritakan kemahiran 4.000 perajin perempuan yang dipekerjakan oleh Amangkurat I untuk pekerjaan dapur, pemintalan benang, penenunan, penyulaman, pembatikan, penjahitan, dan aneka pekerjaan perempuan lainnya (Rouffaer, 1904: 16). Dalam konteks kultus kemegahan ataupun kebutuhan praktis, batik tulis karya perempuan -misalnya- tidak kalah penting dibandingkan dengan keris karya laki-laki. Bukan hanya karena batik juga bisa dihasilkan dalam cita-rasa seni yang tinggi, tetapi seperti keris pula batik bisa sebagai penanda status sosial pemakainya.

Pembuatan barang yang berorientasi pertama-tama dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri telah berlangsung di tengah-tengah masyarakat dalam rentang waktu yang sangat panjang. Bahkan, tradisi pra-pasar ini pada awal abad ke-20 masih bisa dijumpai dengan mudah di daerah Yogyakarta. Sebuah kesaksian pernah mengemukakan, bagi ibu-ibu rumah tangga di desa yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli pakaian bagi keluarga mereka, cara yang lazim ditempuh adalah membeli benang dan kemudian menenunnya sendiri. Apabila ongkos jahit juga tidak dimiliki, mereka akan "menjahit"-nya sendiri secara sederhana (De Vrouw, 2007: 4).

Satu hal yang tidak boleh keliru dipahami adalah bahwa, meskipun pembuatan barang untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri masih bisa dijumpai dengan mudah pada awal abad ke-20, pembuatan barang dalam rangka melayani pasar tidak serta-merta belum muncul. Dari sumber yang telah dikutip di atas juga bisa diketahui adanya benang dan pakaian jadi yang diperjual-belikan atau sebagai komoditas perdagangan. Artinya, di balik informasi itu terdapat perajin yang secara sadar berusaha memproduksinya untuk melayani pasar. Orientasi pasar seperti ini pun telah lama dikenal oleh masyarakat di daerah Yogyakarta, berdampingan dengan pola produksi non-pasar. Terlihat, transformasi produksi dari sifat non-pasar ke sifat pasar tidak berjalan serentak untuk seluruh elemen masyarakat.

Bukti-bukti bahwa kegiatan memproduksi barang untuk diperjual-belikan telah berlangsung lama di daerah Yogyakarta bisa ditunjukkan sebagai berikut. Setelah perjanjian Giyanti 1755, *Vorstenlanden* (Daerah Kerajaan: Surakarta dan Yogyakarta) mengalami masa kemakmuran dan perdagangannya dengan Pantai Utara Jawa berkembang luas. Pada waktu itu komoditasnya, selain tanaman dagang (kapas, tembakau, dan nila), juga produk-produk lokal seperti: beras,



benang, kain tenun, kain batik, tikar pandan, dan minyak kacang (Carey, 1981: 5). Pada awal abad ke-19 kain dan benang kapas merupakan komoditas perdagangan terpenting ketiga dari *Vorstenlanden* setelah padi dan tembakau. Selain benang, kain putih, dan kain batik, produk daerah Yogyakarta yang laku keras di Pantai Utara, bahkan juga di Indonesia Timur, adalah kain *kelengan* (batik warna biru sederhana) dan kain *lurik* (Carey, 1981: 11).

Data perdagangan di atas memperlihatkan bahwa sejumlah produk kerajinan tidak hanya dikonsumsi keluarga sendiri ataupun diperjual-belikan di daerah Yogyakarta, tetapi beredar luas di pasar-pasar di daerah lain, yang konon mendatangkan keuntungan cukup besar. Carey (1981: 12), misalnya, memberikan informasi tentang tingkat keuntungan minyak kacang yang mencapai tidak kurang dari 25%. Sudah tentu prospek pasar yang baik akan mendinamisasikan cabang-cabang industri penghasilnya. Namun, yang tidak kalah penting dari data di atas adalah bahwa produk industri dari daerah Yogyakarta yang laku keras di Pantai Utara Jawa adalah barang-barang yang dominan dihasilkan oleh perempuan. Artinya, peran kaum perempuan dalam menopang ekonomi pasar melalui kegiatan produktif mereka sangat signifikan.

Dari waktu ke waktu kegiatan industri rakyat di daerah Yogyakarta terus meluas hingga pelosok-pelosok desa. Namun, sebagian besar usaha dilakukan dalam bentuk industri rumah dan industri kecil. Arti penting kegiatan bukan besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi perjuangan hidup penuh peluh para pelakunya. Banyak di antara mereka menjalani sebagai upaya memperoleh tambahan penghasilan, melanjutkan tradisi memproduksi barang yang telah muncul pada zaman pra-pasar. Hanya saja kini mereka tidak hanya berorientasi memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga untuk menyuplai kebutuhan orang lain (Soeroto, 1983: 21). Permintaan pasar di satu sisi dan usaha memperingan beban keuangan keluarga di sisi lain telah mendorong kuat banyak petani mengembangkan industri rumah.

Kesantian hidup, apalagi kemalasan kerja, seperti yang sering dipersepsikan oleh pengamat luar, bukanlah realitas umum, terlebih bagi kaum perempuan dari kalangan rakyat jelata. Mereka riil memiliki tugas ganda; selain sebagai ibu rumah tangga, mereka juga harus membantu suami mengolah lahan pertanian. Kecuali itu, perempuan sering masih memiliki satu atau lebih pekerjaan tambahan, seperti mengelola warung, membatik, mewarnai kain, memintal benang, menenun, membuat gerabah, atau pekerjaan-pekerjaan lain (*De Vrouw*, 1907: 4). Dalam hal ini mereka tidak sedang merealisasikan mimpi tentang investasi modal,



tetapi bekerja keras untuk tercukupinya anggaran belanja keluarga.

Kenyataan bahwa di daerah Yogyakarta lebih banyak manusia kerja daripada individu pemalas juga tampak dari banyaknya cabang industri yang pernah berkembang di sana. Pada 1830-an cabang-cabang industri rakyat itu antara lain: pemintalan, penenunan, pembatikan, pembuatan *blawu*, pencelupan, pembuatan garam, pembuatan minyak kelapa dan minyak lainnya, pembuatan gula kelapa, pembakaran kapur, kerajinan emas, perak, tembaga, kuningan, besi, kaleng, kayu, batu, kulit, tanduk, genteng, batu bata, gerabah, anyam-anyaman, dan pertukangan lain (A.V. 1836 dan 1838). Beberapa di antaranya memiliki sejumlah spesialisasi lebih lanjut, seperti pada kerajinan tembaga, besi, kayu, kulit, dan anyam-anyaman. Secara ringkas, produk yang dihasilkan amat beragam, dari barang-barang mewah yang bertengger di keraton megah hingga barang-barang murah yang berserak di dapur petani miskin.

Intensitas dan ekstensitas penekunan industri di kalangan rakyat daerah Yogyakarta bisa dilihat dari data ilustrasi tentang jumlah keluarga yang menekuni kegiatan industri sebagai spesialisasi. Pada 1836, sebagai contoh, tercatat 500 penenun di Kabupaten Sleman, 3.000 pembuat minyak kelapa dan 100 pembuat nila cair di Kecamatan Kalasan, 800 tukang celup yang tersebar di seluruh daerah Yogyakarta, 1.500 pembuat gula kelapa di Kabupaten Bantul dan Sleman, dan 773 keluarga pembuat garam di Pantai Selatan (Carey, 1981: 13). Jumlah ini (dalam satuan keluarga) dapat dikatakan cukup besar, karena pada 1836 jumlah total penduduk di daerah Yogyakarta baru tercatat sekitar 300.000 jiwa (A.V. 1836). Padahal, data di atas tidak merangkum seluruh cabang industri dan hanya memberitahukan tentang keluarga yang menekuni sebagai spesialisasi (pekerjaan pokok).

Terlepas apakah pelakunya menjalani sebagai pekerjaan pokok atau sampingan, jumlah perajin yang signifikan untuk ditambahkan pada data ilustrasi di atas adalah dari sektor batik. Dengan mempertimbangkan keberadaan 800 tukang celup yang tersebar di seluruh daerah Yogyakarta, kita memiliki gambaran bahwa jumlah orang yang terlibat dalam proses produksi batik pada 1836 jauh lebih besar dari jumlah tukang celup. Persebarannya pun bisa diperkirakan cukup luas, menjangkau kawasan pedesaan yang jauh dari kota. Alasannya, proses produksi batik terdiri dari banyak tahapan, dan setiap tahap membutuhkan tenaga khusus. Selain itu, pada 1830-an batik cap, yang pengerjaannya lebih cepat dan para pengecapnya adalah kaum laki-laki, belum dikenal (lih. Rouffaer, 1904: 21).

Seperti telah dikemukakan pada bagian depan, memintal,



menenun, dan membatik adalah pekerjaan perempuan. Hal serupa juga berlaku dalam pembuatan minyak kelapa dan gula kelapa, kendati pada proses pra-pengolahannya (pemetikan hingga pencungkilan buah kelapa ataupun penyadapan nira) merupakan pekerjaan laki-laki. Tentu tidak perlu untuk diragukan bila perempuan juga terlibat aktif dalam pembuatan nila cair, pewarnaan kain, dan pembuatan garam. Namun, yang lebih penting lagi adalah bahwa produk dari beberapa usaha ekonomi "perempuan" tadi, selain melayani kebutuhan daerah Yogyakarta sendiri, mampu menjadi komoditas perdagangan lintas batas daerah.

Laporan-laporan umum tahunan residen (*Algemeen Verslag / A.V.*) mencatat eksportasi kain batik dan kain lurik ke daerah lain. Bahkan, setidaknya hingga awal abad ke-20, daerah Yogyakarta –dan Surakarta– masih mempertahankan nama harumnya untuk menghasilkan batik yang paling indah, paling asli, dan paling aristokratis, yang tetap dicari oleh semua pembesar pribumi di Jawa (Rouffaer, 1904: 27). Batik Kerajaan (*Vorstenlanden*), demikian disebut, juga selalu menjadi pusat perhatian ketika pameran-pameran industri dilakukan, baik di Indonesia maupun di Belanda (lih. *De tentoontelling*, 1906: 2; *De batiktentoonstelling*, 1923: 145-146; *De Javaansche batik tentoontelling*, 1926: 5-6). Prestasi "ikonik" batik tulis *Vorstenlanden* yang diakui oleh dunia bisa dikatakan sebagai prestasi kaum perempuan, tak terkecuali perempuan-perempuan desa bersahaja nun-jauh dari kota.

Ketika sedang mengalami masa-masa sulit sekalipun, seperti terjadi pada akhir 1920-an, industri batik tetap memiliki arti yang sangat besar. Menurut Kat Angelino (1930: 178), pada waktu itu setiap orang yang baru pertama kali mengunjungi Yogyakarta akan tertarik bagaimana di kota dan di jalan-jalan menuju desa, di stasiun-stasiun, di kereta dan di bus, penuh perempuan yang membawa kain batik setengah jadi. Menurutnya, terutama untuk ribuan perempuan desa, yang karena berbagai alasan tidak bisa meninggalkan kampung halamannya, tetapi dengan senang hati ingin memperoleh penghasilan tambahan, berusaha atau bekerja pada sektor batik merupakan solusi yang baik. Memang, uang yang diperoleh para perempuan pembatik sering tidak seberapa. Namun, ketenaran batik Yogyakarta hingga manca negara, yang kini gemanya masih terdengar, tidaklah mungkin bisa mengabaikan peran penting mereka.

Yogyakarta tidak hanya terkenal karena batik tulisnya, tetapi juga karena tenun luriknya. Meskipun industri tenun sebelum revitalisasi pada akhir 1920-an terus mengalami kemunduran, produk luriknya tetap



memiliki pasar di daerah lain. Pada awal 1890-an, misalnya, kain lurik dari Yogyakarta banyak diminati di Karesidenan Kedu (K.V. 1892, Bijl. C. No. 13: 2) dan di Karesidenan Madiun (K.V. 1892, Bijl. C. No. 16: 3) berkat mutunya yang baik. Padahal, kedua karesidenan ini, terutama Madiun, juga merupakan produsen tenun. Lagi-lagi di sini para perempuan desa di daerah Yogyakarta mampu mengukir prestasi. Arus deras kain warna dari Eropa bukan halangan untuk terus memproduksi, kendati volume produksi sebelum masa revitalisasi secara keseluruhan menyusut.

Prestasi kerja perempuan desa di daerah Yogyakarta yang tidak kalah menarik adalah dalam hal produksi minyak kelapa dan gula kelapa. Dalam rentang waktu cukup lama, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Yogyakarta sendiri, kedua produk itu juga banyak dikirim ke daerah lain. Pada 1836, misalnya, ekspor minyak kelapa untuk melayani pasar-pasar di karesidenan lain tercatat 9.000 pikul (1 pikul = 61,76 kg), senilai 63.000 gulden (A.V. 1836). Nilai ekspor ini cukup besar, karena setara dengan harga 31.500 pikul beras, serta enam kali lebih besar dari nilai ekspor benang dan kain yang tercatat pada transaksi pasar pada tahun yang sama (A.V. 1836). Pada 1840 nilai ekspor komoditas ini meningkat menjadi 70.000 gulden dan ekspor gula kelapa sebesar 2.000 pikul senilai 6.000 gulden (A.V. 1840).

Pada dekade-dekade berikutnya nilai ekspor minyak kelapa tidak bisa diketahui. Namun, eksportasinya sendiri terus berlangsung, bahkan bisa diperkirakan meningkat, setidaknya hingga 1880-an, karena laporan-laporan umum residen hingga saat itu memberikan penilaian amat positif terhadap perkembangan industri rakyat. Kebutuhan kaleng yang terus meningkat pada periode itu merupakan indikasi tersendiri. Minimnya ekspor minyak kelapa ke daerah lain baru diberitakan pada awal 1890-an. Hal ini sebenarnya seiring dengan meningkatnya ekspor kopra dan gula kelapa pasca tersambunginya jaringan kereta api lintas barat dan lintas timur (K.V. 1892, Bijl. C. No. 14: 3). Perlu dicatat, pada 1890 kopra telah menjadi salah satu komoditas ekspor utama Hindia Belanda (Furnivall, 1967: 337), yang bersama-sama dengan melonjaknya ekspor gula kelapa mungkin sekali mengganggu produksi minyak kelapa. Alasannya, industri minyak kelapa berebut buah kelapa dengan industri kopra dan berebut pohon kelapa dengan industri gula kelapa.

Industri garam di Pantai Selatan juga memiliki nilai unik bagi peran penting kaum perempuan. Industri rakyat miskin ini pada 1830-an telah menjadi korban kebijakan pemerintah kolonial. Demi menegakkan usaha monopolinya di bidang pemasaran garam, pemerintah hanya mengizinkan produksi garam di Pantai Selatan sebatas untuk memenuhi



kepentingan masyarakat daerah Yogyakarta sendiri. Namun, garam dari Pantai Selatan yang lebih murah terus mengalir secara illegal ke Karesidenan Kedu dan Surakarta, terutama ke desa-desa yang berbatasan dengan Karesidenan Yogyakarta. Pemerintah kolonial terus dibikin berang, sehingga pada 1890 harus membangun gudang-gudang garam di daerah perbatasan agar bisa menangkalnya lebih efektif (K.V. 1892, Bijl. C. No. 13: 4). Tanpa semangat kerja dan semangat hidup yang tinggi, penjualan garam ke luar daerah tentu sudah berakhir pada 1830-an.

### **Keunggulan Yogyakarta, Kemenonjolan Perempuan**

Selama 1830-an – 1930-an, intensitas dan ekstensitas kegiatan industri rakyat (industri rumah dan industri kecil) sebagai cerminan dari semangat kerja dan semangat hidup yang tinggi para pelakunya terus terpelihara di daerah Yogyakarta. Mengasosiasikan daerah pedalaman ini semata-mata dengan sektor pertanian tentulah keliru. Data 1830-an telah memberi petunjuk yang jelas tentang keanekaragaman cabang industri dan cukup banyaknya tenaga kerja yang terserap ke dalamnya. Keadaan demikian masih bisa ditemukan pada satu abad kemudian. Data 1930, yang diolah oleh Sitsen (1937: 171-200) dari hasil sensus, menunjukkan bahwa dari 1.538.868 jiwa penduduk daerah Yogyakarta, 163.397 jiwa (10,6%) bekerja pada (menekuni) sektor industri rakyat. Persentase ini hanya terpaut 7,1% lebih kecil dari persentase penekun sektor pertanian yang pada waktu itu tercatat 273.060 jiwa (17,7%).

Data 1930 sangat menarik untuk disimak lebih teliti. Persentase jumlah orang yang menekuni sektor industri rakyat di daerah Yogyakarta tersebut ternyata merupakan persentase yang paling tinggi di Jawa dan Madura. Dihitung dari jumlah penduduk masing-masing, posisi kedua diduduki Karesidenan Jepara-Rembang (7,1%) dan posisi ketiga Surakarta (5,9%). Lebih lanjut, ada 6 karesidenan yang jumlah penekun industri rakyatnya berkisar antara 5,1 – 4,5%, yakni Banyumas, Pekalongan, Jakarta, Kedu, Surabaya, dan Kediri. Sepuluh karesidenan lainnya ada pada kisaran antara 3,7% (Madura) hingga 1,1% (Banten). Pada 1930 itu, jumlah penekun industri rakyat di seluruh Jawa dan Madura tercatat sebesar 4% dari jumlah total penduduk. Artinya, persentase jumlah penekun industri di daerah Yogyakarta, selain paling tinggi, sekaligus juga jauh di atas persentase Jawa dan Madura.

Dari data pada Tabel Sitsen terlihat bahwa penekun industri rakyat di daerah Yogyakarta menyebar ke seluruh kabupaten. Bahkan dari segi persentasenya –dari jumlah penduduk masing-masing– Kabupaten Bantul tertinggi (14,92%), disusul Kulonprogo (13,66%), Yogyakarta



(12,27%), Pakualaman (11,63%), Adikarto (6,78%), dan Gunungkidul (1,55%). Bila di daerah Surakarta terdapat 3 kabupaten (Sragen, Boyolali, dan Wonogiri) yang miskin penekun industri, maka di daerah Yogyakarta status seperti itu hanya bisa dikenakan untuk Kabupaten Gunungkidul (Sitsen, 1937: 197-200). Menariknya lagi, pada waktu itu perbandingan antara jumlah penekun industri dan jumlah penekun pertanian di Kabupaten Yogyakarta (termasuk sebagian besar wilayah Sleman sekarang) dan Kabupaten Bantul berimbang (50:50).

Peran penting perempuan bagi perkembangan industri rakyat di daerah Yogyakarta juga terlihat secara jelas dari Tabel Sitsen. Pada 1930 Proporsi perajin perempuan –dari jumlah perajin masing-masing– tercatat untuk Kulonprogo sebesar 91,46%; Adikarto 86,30%; Bantul 80,53%; Gunungkidul 79,87%; Yogyakarta 74,26%; dan Pakualaman 34,13%. Artinya, hanya di Puro Pakualaman saja yang perajin laki-laki merupakan kelompok mayoritas, bahkan di Kulonprogo nyaris perempuan semua. Validitas data tentu saja bersifat relatif, tetapi persentase tadi setidaknya memberi petunjuk tentang jauh lebih besarnya jumlah perajin perempuan daripada jumlah perajin laki-laki. Keadaan demikian bukanlah fenomena baru pada akhir 1920-an, karena data pada satu abad sebelumnya seperti telah dikutip di bagian depan juga mengindikasikan realitas yang sama.

Dengan mempelajari kolom 'keterangan' pada Tabel Sitsen diketahui bahwa cabang-cabang industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja antara lain pembuatan batik, tenun, makanan dan sarana kenikmatan, serta pengerjaan kayu dan bambu. Cabang-cabang industri ini di mana-mana selalu memiliki perajin perempuan yang jauh lebih banyak daripada perajin laki-laki. Untuk cabang industri yang disebut terakhir, peran perempuan tentunya lebih terakomodasi pada usaha pengerjaan bambu, yakni dalam pembuatan berbagai produk anyam-anyaman. Ketika krisis ekonomi terjadi pada 1930-an, industri tenun dan anyam-anyaman justru menunjukkan vitalitasnya yang tinggi. Meskipun harga produk merosot dan hasil yang diperoleh tidak seberapa, para perempuan perajin harus meneruskan atau bahkan meningkatkan produksi mereka tidak demi memperoleh uang tunai di zaman sulit (O'Malley, 1977: 192-193).

Sejak pertengahan 1920-an industri tenun mengalami revitalisasi, yang kemudian mendapatkan momentum terbaiknya justru pada saat terjadi krisis ekonomi. Sejak krisis, industri ini merupakan salah satu cabang usaha dalam program pembangunan industri substitusi impor yang didorong kuat oleh pemerintah. Alat-alat tenun tangan model baru yang lebih produktif didatangkan (MvO 1934: 525-526); puluhan ribu



perajin perempuan kembali digairahkan (Sitsen, 1937: 197-198); dan, kecuali kain lurik, slendang, dan stagen, produk-produk baru seperti handuk, serbet, sapu tangan, taplak, dan pengepel lantai dihasilkan, dan semua menemukan pasar yang luas (MvO 1939: 220-236). Hal serupa juga dialami oleh usaha anyam-anyaman yang mampu menyerap belasan ribu perempuan desa. Bahkan, pada paruh kedua 1930-an, tikar pandan dan mendong dari Distrik Godean dan Sleman sebagian juga diekspor ke Singapura, Siam, Jerman, dan Belanda (MvO 1939: 222), kontras dengan keadaan pada akhir abad ke-19 ketika daerah Yogyakarta merupakan konsumen tikar produk Muntilan (Meijer, 1892: 374 dan Bevervoorde, 1905: 2).

Dari hasil wawancara dengan para tetua pelaku kegiatan ekonomi diketahui bahwa sistem penjualan barang hasil kerajinan pada masa sekarang berbeda dengan yang terjadi pada masa lampau. Bila kini para bakul dari luar datang ke tempat produksi atau setidaknya ke pasar terdekat dari lokasi produksi untuk kulakan, maka pada zaman dulu barang-barang hasil kerajinan itu harus dijajakan ke luar, bergerak dari satu tempat ke tempat lain secara berkeliling. Sebagai ilustrasi, seorang nenek tua berusia 87 tahun pernah menuturkan pengalamannya bahwa ketika masih berusia 16 tahun ia telah terbiasa menjajakan *kalo* dan *tambir* dari tempat tinggalnya di Dlingo (Bantul) hingga kota Magelang dengan berjalan kaki. Konon, hal serupa juga dilakukan oleh orang tuanya dan para tetangga. Katanya, kemiskinan bukan untuk diratapi, tetapi harus diisi dengan kerja keras. "Pribumi malas" untuk sebagian besar hanyalah mitos yang berfungsi untuk menopang kepentingan yang bersifat kolonialistik (lih. Alatas, 1988).

Peran signifikan perempuan dalam pengembangan industri rakyat di daerah Yogyakarta pada 1830-an – 1930-an tidak hanya bisa dipahami dari sisi jumlah mereka, banyaknya cabang industri yang ditekuni, dan keluasan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan. Pemahaman akan semakin lengkap dan bermakna manakala dinamika aktivitas industri itu dikaitkan dengan persoalan-persoalan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Yogyakarta. Kegiatan industri rakyat yang bersifat aneka ragam, meluas hingga pelosok-pelosok desa, dan mayoritas penekunnya adalah perempuan itu, meminjam tesis Toynbee (Somervel, 1971), perlu diartikan sebagai sebuah jawaban (*response*) atas tantangan (*challenge*), atau solusi atas persoalan. Dengan cara demikian, pandangan subyektif tentang pribumi malas pun bisa dibantah dengan penjelasan yang lebih komprehensif.

Seperti terjadi di daerah manapun di Jawa dan Madura, jumlah



penduduk daerah Yogyakarta terus meningkat. Bila pada 1833 penduduk di daerah kerajaan ini baru tercatat 283.820 jiwa (A.V. 1833), maka pada 1890 telah mencapai 785.473 jiwa (K.V. 1892, Bijl. A). Pada awal abad ke-20, tepatnya pada 1905, jumlahnya telah melampaui 1.100.000 jiwa (R.A. 1910), dan 25 tahun kemudian (1930) membengkak menjadi 1.558.844 jiwa (MvO 1934). Persentase pertumbuhan penduduk yang paling tinggi terjadi antara 1876 (441.801 jiwa; K.V. 1878) dan 1890 (785.473 jiwa), karena selama 14 tahun meningkat sebesar 77,8%. Tingkat pertumbuhan yang tinggi pada periode ini, selain karena faktor kelahiran, amat mungkin disebabkan pula oleh arus masuk penduduk baru seiring dengan makin meluasnya usaha perkebunan swasta Barat.

Pada periode berikutnya, tingkat pertumbuhan penduduk mengecil. Selama 15 tahun antara 1890 - 1905 pertumbuhannya tercatat 43,3%, jauh lebih kecil dari pertumbuhan selama 14 tahun antara 1876 - 1890. Tingkat pertumbuhan yang lebih kecil lagi terjadi antara 1905 - 1930, karena selama 25 tahun hanya meningkat sebesar 39,3%. Apabila pada perempat terakhir abad ke-19 diperkirakan terjadi arus masuk penduduk baru dari luar, maka setidaknya sejak awal abad ke-20 terjadi arus keluar (migrasi), seperti ke Deli (Sumatera Utara) sebagai kuli-kontrak untuk perkebunan tembakau, ke Lampung (Sumatera Selatan) dalam program kolonisasi (Ricklefs, 1991: 234), dan ke Jawa-Timur untuk menemukan tempat tinggal dan pekerjaan baru. Migrasi ke luar daerah bisa dipahami sebagai salah satu solusi atas problem sosial-ekonomi (kemiskinan dan ketenagakerjaan) yang muncul seiring dengan penambahan penduduk.

Perlu diketahui, pada 1930 tingkat kepadatan penduduk di daerah Yogyakarta cukup tinggi dan sekaligus merupakan yang paling tinggi di Jawa dan Madura (lih. Sitsen, 1937: 171-200). Pada waktu itu, kepadatan penduduk di kawasan subur yang kini menjadi wilayah dari Daerah Tingkat II Sleman, Yogyakarta, dan Bantul mencapai lebih dari 800 jiwa/KM<sup>2</sup>; Kulonprogo, termasuk Adikarto dulu, sekitar 500 jiwa/KM<sup>2</sup>; dan Gunungkidul 226 jiwa/KM<sup>2</sup>. Untuk Gunungkidul, meskipun tingkat kepadatan penduduknya paling rendah, banyak tanah di sana yang tidak bisa digarap secara optimum sebagai lahan pertanian karena merupakan batu karang. Selain itu, sebagian besar lahan pertanian mengandalkan curah hujan.

Pertambahan jumlah penduduk yang berlangsung terus-menerus telah mengakibatkan semakin tidak mencukupinya lahan pertanian bagi kehidupan layak seluruh warga. Jumlah keluarga berlahan sempit atau bahkan tanpa tanah pertanian dengan sendirinya dari waktu ke waktu terus membesar, terutama di kawasan subur dataran rendah. Apalagi, di



kawasan ini terkonsentrasi usaha kapitalistik perkebunan swasta Barat yang hingga menjelang krisis ekonomi 1930 terus meluas, sehingga setiap tahunnya menyita belasan ribu hektar sawah untuk ditanami tanaman ekspor (lih. Houben, 2002: 530; Dickhoff, 1917: 372; Harreveld, 1927: 6-9; dan *Productie*, 1932: 188). Bahkan, sebelum sistem tanah lungguh dihapuskan pada 1918, rakyat tidak diberi hak milik atas tanah yang didiaminya (Nakamura, 1983: 49). Bila tanah lungguh disewakan oleh pejabat / bangsawan pemegangnya, maka penduduk yang berdiam di situ harus tunduk kepada pihak penyewa. Seperti sebelum disewakan, mereka harus mengerjakan seluruh luas tanah, tetapi hanya berhak atas 2/5 bagian saja untuk kebutuhan keluarga (O'Malley, 1977: 167-169 dan Suhartono, 1993: 186).

Dari uraian di atas terlihat bahwa kerja keras sesungguhnya telah menjadi santapan harian bagi petani jauh sebelum problem pertanian muncul sebagai akibat pertambahan penduduk. Jumlah yang lebih besar dari hasil keringatnya justru mengalir ke pihak-pihak yang merasa berhak atas tanah yang dikelolanya (raja, bangsawan, bekel, ataupun pengusaha Barat selaku penyewa). Pertambahan penduduk memperparah keadaan, dan akibat-akibat dari hal ini merupakan tantangan yang membutuhkan jawaban. Salah satu jawabannya, seperti telah disinggung pada bagian depan, adalah migrasi. Jawaban lainnya yang tidak kalah kreatif adalah menekuni sektor industri sebagai pekerjaan sampingan (bagi petani lahan sempit) atau sebagai pekerjaan pokok (bagi mereka yang tidak memiliki lahan pertanian), secara mandiri atau bekerja pada usaha orang lain.

Bila dikaitkan dengan tingkat kepadatan penduduknya yang tinggi, bahkan tertinggi di Jawa-Madura, maka bukan kebetulan jika persentase jumlah penekun industri (dari total penduduk) di daerah Yogyakarta juga tinggi dan sekaligus tertinggi di kedua pulau itu. Bukan kebetulan pula bila di kawasan subur padat penduduk (Sleman, Yogyakarta, dan Bantul) jumlah penekun industri berimbang dengan jumlah penekun pertanian. Bagi puluhan ribu orang, lahan dan hasil pertanian yang tidak lagi mencukupi kebutuhan menggerakkan mereka untuk menekuni sektor industri dengan cara mentransformasikan tradisi memproduksi barang pra-pasar yang telah lama berlangsung menuju ke usaha yang mampu mendatangkan pendapatan. Terlepas dari hasil yang diperoleh, yang bagi banyak orang sering amat kecil, jelas langkah mereka merupakan bentuk vitalitas dan kreativitas yang relevan untuk dinarasikan.

Ketika disadari 80% penekun industri rakyat di daerah Yogyakarta adalah perempuan, maka bisa dikatakan mereka merupakan



aktor utama dalam mengatasi problem sosial-ekonomi masyarakat. Pada saat sektor pertanian tidak mampu menampung seluruh angkatan kerja, dan berkat sifat usaha yang bisa dilakukan dengan modal sangat kecil, mereka telah dengan mudah menggelincir ke sektor industri. Ketika sektor pertanian ada dalam proses involusi yang makin akut, kaum perempuan merupakan penopang utama kegiatan industri yang intensif sekaligus ekstensif, yang aneka ragam sekaligus membentang luas hingga ke pelosok-pelosok desa. Melalui kerja keras mereka, beban ekonomi keluarga diringankan dan ketenaran Yogyakarta pun ditorehkan. Mereka bukanlah orang yang bergantung pasif dari kerja kaum laki-laki (suami), tetapi bagian integral dari manusia kerja, yang dalam perjuangan hidup keluarga bukannya siang untuk malam dan malam untuk siang, tetapi siang-malam untuk bekerja. Lihat saja, misalnya, keluarga yang hidup dari usaha pembuatan gula kelapa atau barang-barang anyaman di desa-desa miskin.

Satu hal yang tidak kalah penting untuk dinarasikan adalah bahwa ketiadaan modal finansial tidak menyurutkan semangat berusaha mereka. Keberlimpahan sumberdaya alam kemudian menjadi sasaran untuk diberi nilai tambah. Air asin *segara kidul* diolah menjadi garam; pandan dan mendong yang tumbuh liar di tepi sungai atau sawah dianyam menjadi tikar, topi, dan tas; bambu di kebun diirai dan dianyam menjadi aneka perabot dapur; tanah liat di sawah menjadi gerabah, genteng, dan batu bata; pucuk pohon kelapa dan aren disadap niranya untuk gula Jawa; buah kelapa menjadi minyak kelapa ataupun kopra; dan dulu, sebelum terdesak oleh produk impor, kapas pun menjadi benang untuk menopang industri tenun. Antara lain melalui peran perempuan, sejumlah sumber daya alam berubah wujud, melanglang hingga tempat-tempat yang jauh dari daerah Yogyakarta, dan kembali dalam bentuk uang atau barang kebutuhan lain. Demikian pula, penetrasi kain impor dan ketergantungan bahan baku dari luar negeri tidak menyurutkan nyali banyak orang untuk tetap memproduksi kain tenun dan batik.

### **Penutup**

Hilangnya perempuan dari narasi sejarah tidak berarti kaum ini tidak memiliki peran penting di masa lalu. Terlewatkannya peran mereka dalam kisah merupakan bentuk dari ketidakberanjakan historiografi dari keasyikan tradisionalnya, penulisan sejarah yang masih terbelenggu oleh pandangan kolot tentang superioritas (semu dan rekaan) laki-laki. Realitas historiografis demikian harus diubah, bukan hanya demi penghormatan kepada kaum perempuan itu sendiri, tetapi lebih luas dan mendasar demi



peradaban atau keadaban umat manusia.

Hasil studi tentang industri rakyat di daerah Yogyakarta pada 1830-an - 1930-an menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berurusan dengan pekerjaan dapur dan membesarkan anak, tidak pula sekedar bisa *nyadhong* rejeki dari kerja keras laki-laki (suami), tetapi secara nyata bertindak aktif dalam aneka kegiatan produktif. Bagi yang masih memiliki lahan pertanian, membantu suami dalam bertani merupakan kelaziman. Namun, kegiatan mereka tidak hanya berhenti di situ. Bermula dari usaha mencukupi kebutuhan keluarga sendiri, mereka menekuni sektor industri sebagai pekerjaan yang mampu mendatangkan pendapatan, berapapun nilai nominalnya.

Menilik kesibukan rutin hariannya, seakan-akan tabu bagi kaum perempuan desa untuk memiliki waktu senggang, karena hidup penuh tantangan. Mereka tidak hanyut dalam persoalan, tetapi secara dinamis berikhtiar mencari jalan keluar, berusaha menemukan jalan pembebasan. Dalam kebersahajaan, apatisme disingkirkan, dialog tiada henti dengan kenyataan dilakukan, dan kreativitas diupayakan; sehingga, ketika sektor pertanian tidak lagi memberi kehidupan yang memadai, mereka berhasil mentransformasikan tradisi pembuatan barang ala pra-pasar yang telah berlangsung sejak nenek-moyang mereka ke dalam kegiatan ekonomi baru yang lebih berdaya-guna. Transformasi ini bukan pertama-tama perkara investasi kapital dalam perspektif berburu keuntungan, tetapi terutama aktualisasi dari kehendak untuk lepas dari belenggu persoalan.

Dalam konteks daerah Yogyakarta, tanpa pengembangan industri kerakyatan besar kemungkinannya gelombang migrasi akan menjadi lebih masif. Padahal, migrasi kala itu cenderung ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan kolonial yang bersifat eksploitatif. Kaum perempuan, melalui kegiatan kerajinan yang bersifat aneka ragam dan meluas, merupakan kekuatan pengendali bagi laju perpindahan penduduk, pengontrol bagi interes tersembunyi dari raksasa eksternalitasnya. Pada saat yang sama, demi pemberdayaan dan pembebasan, mereka merupakan korps pewaris kearifan ataupun kekuatan lokal. Modal finansial yang sangat minim bukan halangan bagi aktualisasi semangat baja untuk menemukan solusi atas persoalan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat. Mereka tidak kalah dan tidak lebih rendah dari laki-laki, kendati secara kultural sering direndahkan. Mereka tidak peduli dengan label *kanca wingking*, teman belakang, karena kehidupan harus terus diperjuangkan dalam perbuatan nyata. Seperti lelakinya, perempuan desa adalah manusia bersahaja tetapi sekaligus bersemangat baja, pantang menyerah terhadap keadaan.



Sekali lagi, menghadirkan perempuan dalam narasi sejarah amatlah penting dan bahkan merupakan keharusan. Sejarah berurusan dengan masa lalu manusia, bukan masa lalu laki-laki saja. Perempuan, seperti halnya laki-laki, juga pelaku sejarah. Bila laki-laki bisa mengukir prestasi fenomenal, maka hal serupa juga bisa ditemukan dengan mudah dalam aktivitas perempuan. Ketika pada 1836 penduduk daerah Yogyakarta baru berjumlah sekitar 300.000 jiwa, uang yang nilainya setara dengan 1.945 ton beras dari hasil penjualan minyak kelapa ke karesidenan lain tentu merupakan prestasi yang tidak bisa diremehkan. Padahal di luar minyak kelapa masih terdapat sederet cabang industri yang melibatkan partisipasi tinggi kaum perempuan, seperti batik tulis yang dulu senantiasa dicari oleh para pembesar Jawa dan yang reputasinya berkaliber dunia, tikar dari Distrik Godean dan Sleman yang pernah mampu menembus pasar di Singapura, Siam, Jerman, dan Belanda, serta kerajinan gerabah yang kini menemukan dunia barunya yang lebih luas dan maju.

Menarasikan keunggulan daerah Yogyakarta dalam pengembangan industri rakyat di masa lalu adalah omong kosong bila tanpa menarasikan keaktoran kaum perempuan. Jumlah mereka yang mencapai 80% (1930) dari total penekun industri terlalu mahal untuk disembunyikan di balik narasi sempit kelatahan konvensional historiografi (berkelamin laki-laki). Selain itu, amat perlu ditekankan bahwa pada zamannya dulu mereka "hadir" dalam rangka mencari solusi atas persoalan besar yang dihadapi, yang berarti juga persoalan masyarakat sebagai keseluruhan. Kala itu, karena himpitan persoalan, laki-laki bisa tergelincir ke dalam kenikmatan semu isap candu yang memabukkan, tetapi perempuan cukup berlari ke tepian sungai untuk mendapatkan daun pandan bagi tikar yang hendak dibuat dan kemudian menjualnya ke pasar.

#### **Daftar Pustaka**

- Alatas, S.H. 1988. *Mitos Pribumi Malas: Citra Orang Jawa, Melayu, dan Filipina dalam Kapitalisme Kolonial*. Jakarta: LP3ES.
- Algemeen Jaarlijks Verslag van de Residentie Djocjokarta over het jaar* (A.V.) 1833. ANRI. Bundel Yogyakarta.
- Algemeen Jaarlijks Verslag van de Residentie Djocjokarta over het jaar* (A.V.) 1836. ANRI. Bundel Yogyakarta.
- Algemeen Jaarlijks Verslag van de Residentie Djocjokarta over het jaar* (A.V.) 1838. ANRI. Bundel Yogyakarta.
- Algemeen Jaarlijks Verslag van de Residentie Djocjokarta over het jaar* (A.V.)



1840. ANRI. Bundel Yogyakarta.

Bambang Purwanto. 2006. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!*. Yogyakarta: Ombak.

Bevervoorde, W.F. Engelbert. 1905. "De vlecht industrie in de Residentie Jogjakarta", dalam *Tijdschrift voor Binnenlandsche Bestuur*, XXIX.

Carey, Peter B.A. 1981. "Waiting for the Ratu Adil ('Just King'): The Javanese Village Community on the Eve of the Java War (1825-30)", makalah pada Second Anglo Dutch Conference on Comparative Colonial History, 23 - 25 September.

"De Batiktentoonstelling", dalam *Djawa: Tijdschrift van het Java-Instituut*, 3de Jaargang, Nummer 3, September 1923.

"De Javaansche batik tentoonstelling in de Gotische zaal te 's-Gravenhage", dalam *Koloniaal Weekblad*, 26ste Jaargang, No. 19, 12 Mei 1926.

"De tentoonstelling te Amsterdam", dalam *Koloniaal Weekblad*, 6de Jaargang, No. 35, 30 Augustus 1906.

"De vrouw in de Indische maatschappij: de dessavrouw", dalam *Koloniaal Weekblad*, 7de Jaargang, No. 35, 29 Augustus 1907.

Dickhoff, W.C. 1917. "De met riet beplante oppervlakte van Java", dalam *Archief voor de suikerindustrie in Nederlandsch-Indie*, 25ste Jaargang, 1ste Deel.

Furnivall, J.S. 1967. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Harreveld, J. van. 1927. "De suikerproductie van Oogstjaar 1926", dalam *Archief voor de suikerindustrie in Nederlandsch-Indie*, 35ste Jaargang, 3de Deel.

Hicks, John. 1969. *A Theory of Economic History*. Oxford: Oxford University.

Houben, J.H. Vincent. 2002. *Kraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830 - 1870*. Yogyakarta: Bentang.

Kat Angelino, P. de. 1930. *Batikrapport II: Midden Java*. Weltevreden: Landsdrukkerij.

*Koloniaal Verslag* (K.V.) 1878, Bijlage A, "Statistiek der bevolking van Nederlandsche-Indie over 1876".

*Koloniaal Verslag* (K.V.) 1892, Bijlage C, "Overzichten betreffende den economischen toestand van den verschillende gewesten van Java en Madoera: 13. Kedoe".

*Koloniaal Verslag* (K.V.) 1892, Bijlage C, "Overzichten betreffende den economischen toestand van den verschillende gewesten van Java en Madoera: 14. Djogjokarta".

*Koloniaal Verslag* (K.V.) 1892, Bijlage C, "Overzichten betreffende den



- economischen toestand van den verschillende gewesten van Java en Madoera: 15. Soerakarta".
- Koloniaal Verslag (K.V.) 1892, Bijlage C, "Overzichten betreffende den economischen toestand van den verschillende gewesten van Java en Madoera: 16. Madioen".
- Meijer, W. 1892. "De Inlandsche kunstnijverheid in de Residentie Kedoe", dalam *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandche-Indie*, Deel XLIV.
- Memorie van Overgave (MvO) van den Afredenden Gouverneur van Jogjakarta H.H. de Cook 1934. ANRI. Mikrofilm, Serie 2e, Film. 8.
- Memorie van Overgave (MvO) van J. Bijleveld, Gouverneur van Jogjakarta 1934-1939. ANRI. Mikrofilm, Serie 2e, Film. 8.
- Nakamura, Mitsuo. 1985. *Bulan Sabit Muncul di Balik Pohon Beringin: Studi tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press.
- O'Malley, W.J. 1977. "Indonesia in the Great Depression: A Study of East Sumatra and Jogjakarta in the 1930's". Thesis PhD. Faculty of the Graduate School of Cornell University.
- "Productie der fabrieken over het geheele oogstjaar 1931 group Djogja", dalam *Archief voor de suikerindustrie in Nederlandsch-Indie*, 40ste Jaargang, 1ste Deel, 1932.
- Regeeringsalmanak (R.A.) voor Nederlandsch-Indie 1910. I: grondgebeid en bevolking, inrichting van het Bestuur van Nederlandsch-Indie en bijlagen. Batavia: Landsdrukkerij.
- Ricklefs, M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rouffaer, G.P. 1904. *De voornaamste industrieen der Inlandsche bevolking van Java en Madoera*. s'Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Sitsen, P.H.W. 1937. "De kleine nijverheid in Inheemsche sfeer en hare expansiemoegeijkheden op Java", dalam *Djawa: Tijdschrift van het Java-Instituut*, 17st Jaargang.
- Soemarsaid Moertono. 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soeri Soeroto. 1983. "Sejarah Kerajinan di Indonesia", dalam *Prisma*, No. 8, Th. XII, Agustus.
- Somervel, D.C. 1971. *A Study of History* (edisi ringkas karya Arnold J. Toynbee). New York: Dell Publishing Co., Inc.
- Suhartono. 1993. "The Javanese Concept of Optimism in Uncertainty: Village Life in the Principalities", dalam J. Thomas Lindblad (ed),



*New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia.* Leiden:  
Programme of Indonesian Studies.

### **Daftar Narasumber**

- Ciptowiyono (L). 72 tahun. Bimerejo, Lendah, Kulonprogo. 14 Juni 2008.  
Harjosemito (P). 87 tahun. Muntuk, Dlingo, Bantul. 8 Juni 2008.  
Kartomo (L). 85 tahun. Sendang Agung, Minggir, Sleman. 13 Juni 2008.  
Manrejo (L). 82 tahun. Banjararum, Kalibawang, Kulonprogo. 13 Juni 2008.  
Martosemono (L). 79 tahun. Beji, Ngawen, Gunungkidul. 12 Juni 2008.  
Mudjadi (P). 75 tahun. Depok, Kretek, Bantul. 28 Mei 2008.  
Muji (P). 80 tahun. Hargorejo, Kokap, Kulonprogo. 5 Juni 2008.  
Mujiharjo (L). 86 tahun. Banjaroyo, Kalibawang, Kulonprogo. 6 Juni 2008.  
Muljoredjo (P). 83 tahun. Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul. 12 Juni 2008.  
Ngudiwiyono (P). 74 tahun. Jetis, Panjangrejo, Pundong, Bantul. 8 Juni 2008.  
Resodikromo (P). 86 tahun. Banjararum, Kalibawang, Kulonprogo. 13 Juni 2008.  
Ruminten (P). 85 tahun. Gamplong, Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman. 4 Juni 2008.  
Siswadi (L). 78 tahun. Karangmojo, Gunungkidul. 12 Juni 2008.  
Sudarmo (P). 76 tahun. Jerontabag, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. 9 Juni 2008.  
Tugiyo (L). 80 tahun. Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul. 12 Juni 2008.